

LAMPIRAN
**DAFTAR KOMITMEN
RENCANA AKSI KETERBUKAAN
PEMERINTAH INDONESIA
2018-2020**



LAMPIRAN-DAFTAR KOMITMEN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

A. KOMITMEN GLOBAL

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
01	Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan (Berdasarkan Aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2019-2020)	Tersedianya dan dimanfaatkan basis data <i>Beneficial Ownership</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi 2. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> untuk pencegahan penyalahgunaan <i>legal persons/arrangements</i> untuk tujuan anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan penyalahgunaan perpajakan. 3. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Keuangan 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 8. Kementerian Perdagangan 9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 11. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi 	<i>Publish What You Pay (PWYP)</i> Indonesia
02	Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Data PBI sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat 2. Tersusunnya Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) 	1. Aplikasi sistem informasi tentang kesejahteraan sosial menyediakan semua proses pembaruan data sebagai hasil dari verifikasi daring. Sebagai <i>platform</i> data, sistem ini juga menyediakan data yang akurat dan valid, diperkaya dengan fitur ekspor dan	Kementerian Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan 2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 	MediaLink

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
		Modul PBI 3. Tersusunnya surat penetapan PBI JK	<ul style="list-style-type: none"> 1. impor data. 2. Pelaksanaan pertemuan konsultasi publik melalui musyawarah kelurahan / desa atau forum lain untuk pembaruan data PBI 3. Ketersediaan dua belas keputusan menteri tentang data yang diperbarui dari penerima PBI berdasarkan input partisipasi warga 			
03	Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/ Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/ lembaga 2. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Sosial 2. Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN 3. Pembentukan portal data anggaran daerah (<i>E-Budgeting</i>) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri 4. Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal <i>E-Budgeting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial 	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
04	Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif	Tersediannya usulan perencanaan anggaran pendidikan berbasis data NPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NPD kepada masyarakat sipil dan pemerintah daerah 2. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk rencana anggaran masyarakat pendidikan dengan masyarakat sipil di daerah 	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ombudsman RI 2. Kementerian Dalam Negeri 	<i>Transparency International Indonesia</i> (TII)
05	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif 2. Tersedianya harmonisasi peraturan Kementerian Desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa pada 3 provinsi (Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat) 2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. FGD ini juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil untuk memperkaya isi dan proses diskusi. 3. Tersedianya <i>draft</i> Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan <i>stakholder</i> dan masyarakat sipil lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2. Kementerian Dalam Negeri 	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. PATTIRO 2. Wahana Visi Indonesia

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			4. Tersedianya <i>draft</i> Permendesa tentang Pendampingan Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan <i>stakeholder</i> dan masyarakat sipil lainnya.			
06	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati	Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui <i>platform</i> E-Legislati. 2. Tersedianya platform E-Legislati dalam <i>website</i> DPRD di 5 kabupaten/ kota. 	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Komisi Informasi Pusat 	<i>Indonesian Parliamentary Center (IPC)</i>
07	Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Terciptanya transparansi data pemilihan yang dapat diakses oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pemilu 2019 secara daring di portal resmi KPU 2. Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU. integrasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah menghubungkan dua portal (http://infopemilu.kpu.go.id dan 	Komisi Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 3. Badan Pengawas Pemilu 	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			<p>https://www.kpu.go.id/) sehingga dapat diakses dalam satu portal.</p> <p>3. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara daring di portal resmi KPU</p> <p>4. Tersedianya informasi data penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam portal Satu Data (data.go.id)</p>			
08	Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	Publikasi Informasi yang valid terkait ketersediaan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya update data kamar, identitas, dan tenaga medis di Puskesmas pada tahun 2018 melalui portal layanan kesehatan Aplikasi iHeff 2. Tersedianya aplikasi Rumah Sakit daring yang terpasang di Dinas Kesehatan 3. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM dan jumlah tempat tidur di rumah sakit melalui portal layanan kesehatan 	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri	<i>Indonesian Corruption Watch (ICW)</i>
09	Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor	Terlaksananya forum konsultasi publik di Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah 2. Mengembangkan <i>data base</i> yang dapat digunakan untuk 	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 	<i>YAPPIKA-Action Aid</i>

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
	16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia		monitoring dan evaluasi FKP 3. Sebanyak 3 (tiga) <i>pilot project</i> pelaksanaan forum konsultasi publik di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial		Tertinggal dan Transmigrasi 5. Kementerian Dalam Negeri	
10	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N	1. Peningkatan penetrasi LAPOR! -SP4N di lembaga pemerintah (target 500 lembaga) 2. Peningkatan jumlah pengaduan ditindaklanjuti dalam LAPOR!-SP4N 3. Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan SOP LAPOR!-SP4N	1. Peningkatan penggunaan LAPOR! di instansi pemerintah (target 500 Instansi) 2. Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%) 3. Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Ombudsman RI	YAPPIKA-Action Aid
11	Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Sistem Pelayanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR!-SP4N dalam KLHK. 2. Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) 2. Ombudsman RI	Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra ⁱⁱ
1	2	3	4	5	6	7
12	Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Keputusan Kepala LKPP tentang daftar informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat 2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di semua pengadaan pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, dan Serah Terima) di lembaga-lembaga pemerintah. 3. <i>Workshop</i> Pengawasan Pengadaan Publik untuk organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional atau regional. 4. Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP. 5. Terbitnya Perki Terkait dengan Daftar Informasi Publik untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Komisi Informasi Pusat (KIP) 	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Indonesia Corruption Watch</i>(ICW) 2. <i>Transparency International Indonesia</i>(TII)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP .			
13	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas berbasis elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan 2. Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N (dilakukan di Kota/Kabupaten terpilih di 5 Provinsi) 3. Terlaksananya revisi Perki No. 1/2010 untuk mendukung permohonan informasi publik berbasis elektronik 	Komisi Informasi Pusat (KIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 6. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Open Data Lab</i> 2. <i>Freedom of Information Network Indonesia (FIONI)</i> 3. Plan C

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
14	Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum	Tersedianya kerangka regulasi dan peningkatan pelayanan bantuan hukum di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Jumlah Perda Bantuan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 100 Perda. Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi. Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 20.000 orang. Membaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum, yang mana 50% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas. 	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	<ol style="list-style-type: none"> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) MediaLink

B. KOMITMEN NASIONAL

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
15	Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan <i>Smart City</i>	Tersosialisasikannya nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah dalam pelaksanaan <i>Smart City</i>	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen dan/atau materi sosialisasi program <i>Open Government</i> Diseminasi dokumen dan/atau materi sosialisasi program <i>Open Government Indonesia</i>, 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Kantor Staf Presiden 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) <i>Transparency International Indonesia</i> (TII) MediaLink

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			<p>pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan <i>masterplan Smart City</i></p> <p>3. Perwakilan Sekretariat <i>Open Government</i> Indonesia dapat ikut serta menjadi salah satu pemateri (narasumber) pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan <i>masterplan Smart City</i>.</p>			<p>4. <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID)</p> <p>5. <i>Indonesian Parliamentary Center</i> (IPC)</p>
16	Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan roadmap (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi peta jalan OGI dan alat ukur keterbukaan pemerintah) 2. Implementasi rencana kerja tim koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, <i>donor meeting</i>, termasuk implementasi renaksi 2018-2020) 	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	Kementerian Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. MediaLink 2. <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID)

